

**KEBIJAKAN PERIJINAN PENDIRIAN MINI MARKET  
DI KABUPATEN KUDUS DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
KEBERADAAN TOKO KELONTONG**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Magister**

**Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

**M. NUR KHABSYIN**

2013-02-011

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
KUDUS  
2015**

**KEBIJAKAN PERIJINAN PENDIRIAN MINI MARKET  
DI KABUPATEN KUDUS DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
KEBERADAAN TOKO KELONTONG**

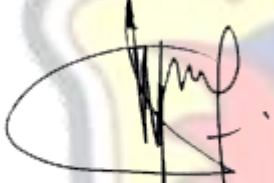
Disusun Oleh:

**M. NUR KHABSYIN**  
NIM. 2013-02-011

Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 10 Maret 2015

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



**Dr. Suparno, SH., MS.**  
Pembimbing Pendamping



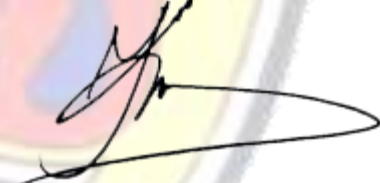
**Subarkah, SH., M.Hum.**

Anggota Dewan Penguji I



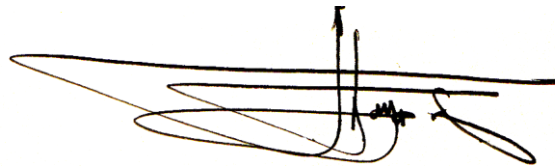
**Dr. Hidayatullah, SH., M.Hum.**

Anggota Dewan Penguji II



**Kristiyanto, SH., M.Hum.**

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister  
Tanggal 10 Maret 2015



**(Dr. Hidayatullah, SH., M.Hum.)**  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nur Khabsyin  
NIM : 2013-02-011  
Alamat : Desa Ngembal Rejo Dukuh Kauman RT 07 RW 04 Bae  
Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Kudus, 11 Maret 2015  
Yang membuat pernyataan

M. Nur Khabsyin

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanaahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “KEBIJAKAN PERIJINAN PENDIRIAN MINI MARKET DI KABUPATEN KUDUS DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERADAAN TOKO KELONTONG”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, nasehat, kritikan dan bantuan, baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, kepada :

1. Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi di Program Magister Ilmu Hukum.
2. Bapak Dr. Suparno, S.H., MS. dan Bapak Subarkah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat.
3. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah mentransformasikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan studi di di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Rekan-rekan Angkatan 2013, yang selalu mendorong untuk menyelesaikan Tesis ini dan menjadi mitra diskusi dalam mengikuti perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai penulisan tesis ini selesai.
6. Keluarga penulis yang selalu mendorong penulis untuk terus meningkatkan kemampuan diri dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Kudus, Maret 2015

Penulis

M. Nur Khabsyin



## ABSTRACT

The emergence of the modern market shaped a mini market like Indomaret and Alfamart in the District of Kudus sells a wide range of household needs and equipped with modern facilities such as ATM (Automatic Teller Machine) make consumer grocery store to be reduced, whereas the presence of an existing grocery store first and could support the daily needs of the family. The existence of a mini market progressively increased, even though many residents protested around and mini market is not a license, but they had dared to operate in Kudus. Kudus District Government side as if not hearing the screams of its citizens who attempt disrupted by the rise of mini market. This is a direct impact on earnings decline grocery store merchant. Such conditions contrary to the objective state of Indonesia as stated in the 1945 UUDNRI provide welfare to its citizens regardless of race country race, religion and certain groups.

The purpose of this study is to provide the proper perspective regarding the establishment of licensing policies mini market in Kudus, knowing the impact of the mini market on the existence of a grocery store in Kudus, analyzing the subject that should be done by the Kudus District Government in providing protection to the grocery store on the impact of the presence of mini market.

This research is a juridical sociological-descriptive qualitative approach. Sociological jurisdiction of a study that was based on a legal provision (regulations) with the fact that occur in the field as well as in practice in accordance with the case and the actual.

Permitting the establishment of a mini market in Kudus during this refers to the arrangement of the modern market through BPMPPT permissions . It should also refer to the Presidential Decree No. 112/2007 and Regulation No. 6 of 2013, but in practice in licensing violations still occur . , That there is still a mini market adjacent to the grocery store . Existence of reduced-impact mini market of consumers who shop at the grocery store , grocery store revenue decline . Holy District Government considered not able to protect the grocery store , so that the welfare of the family grocery store owners to decrease.

Keywords : Public Policy , Licensing Mini Market , Grocery Stores .

## INTISARI

Munculnya pasar modern berbentuk mini market seperti Indomaret dan Alfamart di wilayah Kabupaten Kudus yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas modern seperti ATM (*Automatic Teller Machine*) membuat konsumen toko kelontong menjadi berkurang, padahal keberadaan toko kelontong sudah ada lebih dahulu dan dapat menjadi penopang kebutuhan keluarga sehari-hari. Keberadaan mini market semakin lama semakin bertambah banyak, bahkan sekalipun sudah banyak diprotes warga sekitar dan mini market tersebut belum mengantongi ijin, tetapi mereka sudah berani beroperasi di Kabupaten Kudus. Pihak pemerintah Kabupaten seolah-olah tidak mendengar jeritan warganya yang usahanya terganggu akibat maraknya mini market. Hal ini berdampak secara langsung terhadap menurunnya penghasilan pedagang toko kelontong. Kondisi demikian bertolak belakang dengan Tujuan Negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam UUDNRI 1945 memberi kesejahteraan kepada warganya negaranya tanpa memandang suku ras, agama dan golongan tertentu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang benar mengenai kebijakan perijinan pendirian mini market di Kabupaten Kudus, mengetahui dampak adanya mini market terhadap keberadaan toko kelontong di Kabupaten Kudus, menganalisa perihal yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memberikan perlindungan terhadap toko kelontong atas dampak keberadaan mini market.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi dan sebenarnya.

Perijinan pendirian mini market di Kabupaten Kudus selama ini mengacu pada pengaturan mengenai pasar modern yang perijinannya melalui BPMPT. Selain itu juga harus mengacu pada Perpres No. 112/2007 dan Perda Nomor 6 Tahun 2013, namun dalam pelaksanaannya pelanggaran dalam perijinan masih tetap terjadi., yaitu masih ada mini market yang bersebelahan dengan toko kelontong. Eksistensi mini market berdampak berkurangnya konsumen yang berbelanja di toko kelontong, menurunnya pendapatan toko kelontong. Pemerintah Kabupaten Kudus dianggap belum mampu melindungi toko kelontong, sehingga kesejahteraan keluarga para pemilik toko kelontong menjadi menurun.

Kata kunci : Kebijakan Publik, Perijinan Mini market, Toko Kelontong.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>INTISARI</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	33
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A Konsep Kebijakan Publik.....	41
B. Konsep Pemerintah Daerah.....	49
C Konsep Mini market.....	56
D Konsep Toko Kelontong.....	61
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Kebijakan Perijinan Pendirian Mini market Di Kabupaten Kudus .....	65
B Dampak Adanya Mini market Terhadap Keberadaan Toko Kelontong di Kabupaten Kudus.....	89
C Perlindungan Terhadap Toko Kelontong Atas Dampak Keberadaan Mini market Oleh Pemerintah Kabupaten Kudus .....	102



**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108

**DAFTAR PUSTAKA**

